



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MAUKARO

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan.....

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MAUKARO TAHUN 2025**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Kecamatan, adalah dokumen Perencanaan Kecamatan untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Maukaro tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.
- (3) Renja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bab I

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu;
- c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.


Pasal 3

Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Kecamatan Maukaro dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

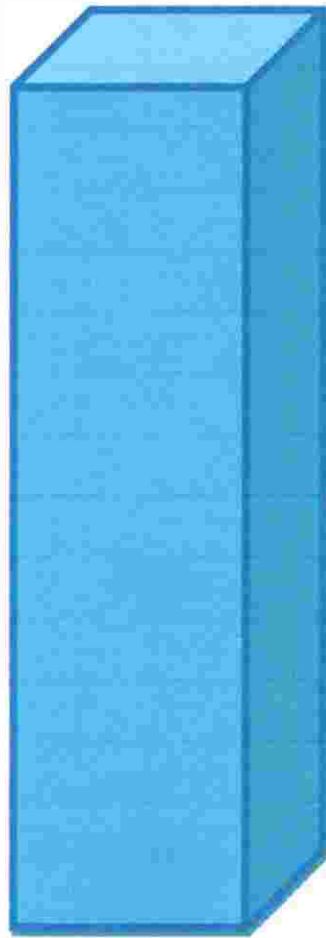
Diundangkan di Ende
pada tanggal 11 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 59



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MAUKARO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN MAUKARO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaannya, kami telah dianugerahkan rahmat yang berlimpah dalam upaya merangkum rangkaian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maukaro Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maukaro merupakan dokumen perencanaan strategis SKPD dalam hal ini Kantor Kecamatan Maukaro memprioritaskan rasionalitas kognifikasi pertanggungjawaban dan perwujudan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Maukaro ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan landasan berpija bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Memberikan dokumen dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Maukaro.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun 2025 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang di emban oleh Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende.

Maukaro,2024

CAMAT MAUKARO

MANSOITUS BANA, S.STP
PEMBINA TK.I
NIP: 19680403 199701 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 59 TAHUN 2024
TANGGAL 4 November 2024
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MAUKARO TAHUN 2025

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| | |
| BAB. I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 2.2. Landasan Hukum | 2 |
| 3.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 4.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 202 | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro | 17 |
| 2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 19 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awai RKPD | 24 |
| 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 35 |
| | |
| BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 36 |
| 3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional | 36 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maukaro | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.1. Tujuan Renja | 37 |
| 3.1.2. Sasaran Renja | 37 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 38 |
| BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 53 |
| 4.1. Rencana Kerja | 53 |
| 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah | 53 |
| BAB. V. PENUTUP | 54 |
| 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | 54 |
| 5.2 Rencana Tindak Lanjut | 54 |

DAFTAR TABEL

| TABEL | JUDUL | HALAMAN |
|-------|---|---------|
| 2.1 | Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende | 10 |
| 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro | 18 |
| 2.3 | Keadaan Pegawai Kecamatan Maukaro | 21 |
| 2.4 | Review Terhadap Rancangan Awai RKPD Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende | 25 |
| 3.1 | Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prekiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende | 39 |

DAFTAR LAMPIRAN

| LAMPIRAN | JUDUL | HALAMAN |
|----------|--|---------|
| 1.1 | Surat Keputusan Camat Maukaro Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Tahun 2025 | 54 |

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangkamenengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana kerja (Renja)-SKPD tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankannya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-OPD.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro melakukan penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya rancangan Renja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Kecamatan Maukaro sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende mempunyai kewajiban yang sama. Hal ini dimaksudkan agar arah dan kebijakan perencanaan kegiatan OPD dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan umum pemerintahan di wilayah Kecamatan Maukaro sejalan dan saling bersinergi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Ende. Selain itu, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Maukaro dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh satuan kerja terkait dalam merencanakan kegiatan dan program di Kecamatan Maukaro.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Yang memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, serta

berperan strategis dalam menjawab berbagai pertanyaan tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Berdasarkan isi dan kedudukannya, maka Renja OPD tahun 2025 menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Maukaro untuk tahun 2025.

Sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih di dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
8. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2026.
12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kecamatan.
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Kecamatan Maukaro Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Maukaro untuk tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Maukaro Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut.

Adapun maksud penyusunan Renja Kecamatan Maukaro adalah

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Maukaro selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2025
3. Memberi arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Tahun 2025.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Tahun 2025.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Maukaro tahun 2025.
6. Menjadi bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja sebagai disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Maukaro
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Penelaahan Usulan Dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maukaro
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MAUKARO

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.

Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024) bahwa dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2025-2026 telah melakuakn dengan baik. Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan dan program dan kegiatan yang memenuhi target hasil keluaran yang direncanakan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel . 2.1. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023

| URAIAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|---|--|-------------|--------|-----------|---------------------|
| ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama satu tahun | % | 100 | 100 | 98,17% |
| <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Indeks pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | % | 100 | 100 | 98,17% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang/Bulan | 18 | 18 | 98,17% |
| <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | <i>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i> | % | 100 | 94,65% | 94,65% |
| Belanja Bahan dan alat logistik kanto | Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan | Paket | 2 | 1 | 94,65% |
| Belanja perjalanan dinas | Jumlah Laporan Perjalanan dinas | Laporan | 12 | 12 | 94,65% |
| <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Indeks Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i> | % | 100 | 91,67% | 91,67% |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 6 | 5 | 90,98% |
| Penyediaan jasa tenaga sopir | Jumlah tenaga Sopir yang yang disediakan | Orang | 1 | 1 | 100% |
| <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i> | % | 100 | 98,26% | 98,26% |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Unit | 1 | 1 | 98,26% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat dengan baik | % | 100 | 100% | 100% |
| <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat</i> | <i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Publik lintas sektor di Kecamatan</i> | % | 100 | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|-----|------|------|
| Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | |
| Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatn | Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatn | Laporan | 6 | 6 | 100% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kecamatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik | % | 100 | 100% | 100% |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 100% | 100% |
| Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Lembaga Kemasyarkat an | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | |

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di tahun 2023 telah dapat sesuai target yang di tetapkan di renstra kecamatan tahun 2019-2024 dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Maukaro di tahun sebelumnya maka akan didapa gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Maukaro antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat dua program yaitu program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang masing-masing memiliki target 100% dan realisasinya 100%..
2. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, untuk program/kegiatan yang ada di Kantor Camat Maukaro yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang yang targetnya 100% dan realisasinya 98,17%

Sesuai dengan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2023, maka dapat di katakan bahwa Kecamatan Maukaro dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori sangat baik yaitu dengan nilai 98,17% -100% hal terdebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut.

- a. **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**
Capaian Kinerja : 100% kategori Memuaskan
- b. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
Capaian Kinerja : 100% kategori Memuaskan
- c. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Capaian Kinerja : 98,17% kategori Baik

Tabel. 2.2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Maukaro

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2024 | | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)* | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | | | | |
|------|---|--|---|-----------|--|---|---|-----------------------|--|--|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | | Target | Realisasi | Realisasi s/d dengan Tahun 2022 | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | | | | | | |
| 1 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | | 100 | Persen | - | 100% | Persen | 98,49% | Persen | 98,49% | 100% | Persen | 99,61 | Persen | 49,78 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 100 | Persen | - | 100% | Persen | 98,40 | Persen | 99,40% | 100% | Persen | 75,93% | Persen | 42,71% | | | |
| 7 | 01 | 01 | 201 | | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 99,98% | Persen | 1,00% | 100% | Persen | 100,00% | Persen | 54,72% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 | Dokumen | - | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00% | 3 | Dokumen | 5 | Dokumen | 55,56% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 | Dokumen | - | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% | 1 | Dokumen | 2 | Dokumen | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 | Dokumen | - | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% | 1 | Dokumen | 2 | Dokumen | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersedia | 4 | Dokumen | - | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% | 2 | Dokumen | 3 | Dokumen | 75,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia | 4 | Dokumen | - | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% | 2 | Dokumen | 3 | Dokumen | 75,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 | Laporan | - | 4 | Laporan | 4 | Laporan | 100,00% | 4 | Laporan | 8 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | 12 | Laporan | - | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 100,00% | 3 | Laporan | 6 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | Persen | - | 100% | Persen | 95,5% | Persen | 95,50% | 100 | Persen | 99,66% | Persen | 50,42% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 88/56 | Orang/bulan | - | 18 / 14 | Orang/bulan | 18 / 14 | Org/bln | 112,50% | 20/14 | Org/bln | 36/28 | Org/bln | 45,50% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 92 | Dokumen | - | 23 | Dokumen | 23 | Dokumen | 100,00% | 23 | Dokumen | 46 | Dokumen | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Orang yang melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 20 | Orang/Tahun | - | 5 | Orang/Tahun | 5 | Orang/Tahun | 100,00% | 5 | Orang/Tahun | 10 | Orang/Tahun | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 4 | Laporan | - | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 100,00% | 1 | Laporan | 2 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 4 | Dokumen | - | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% | 1 | Dokumen | 2 | Dokumen | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----|--------------|---|------|--------------|--------|--------------|---------|-----|--------------|---------|--------------|--------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 72 | Laporan | - | 18 | Laporan | 18 | Laporan | 100,00% | 18 | Laporan | 36 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 | Dokumen | - | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 100,00% | 1 | Laporan | 2 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 100% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Orang yang melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Orang/ Bulan | - | 1 | Orang/ Bulan | 1 | Orang/ Bulan | 100,00% | 1 | Orang/ Bulan | 2 | Orang/ Bulan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar | 48 | Laporan | - | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100,00% | 12 | Laporan | 24 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | Persen | - | 100% | Persen | 100% | Persen | 100,00% | 100 | Persen | 0,66% | Persen | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 | Orang | - | 1 | Orang | 1 | Orang | 100,00% | 1 | Orang | 2 | Orang | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 99,97% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 46,88% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 | Paket | - | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% | 1 | Paket | 2 | Paket | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 | Paket | - | 1 | Paket | 0 | Paket | 0,00% | 0 | Paket | 0 | Paket | 0,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | Paket | - | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% | 1 | Paket | 2 | Paket | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 48 | Laporan | - | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100,00% | 12 | Laporan | 24 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 | Kali | - | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% | 1 | Kali | 2 | Laporan | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----|---------|---|------|---------|--------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | Persen | - | 100% | Persen | 91,91% | Persen | 91,91% | 100 | Persen | 7,14% | Persen | 7,69% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 | Unit | - | 1 | Unit | 1 | Unit | 100,00% | 0 | Unit | 1,00 | Unit | 25,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 | Unit | - | 1 | Unit | 0 | Unit | 0,00% | - | Unit | 0,00 | Unit | 0,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | Unit | - | 1 | Unit | 0 | Unit | 0,00% | 0 | Unit | 0,00 | Unit | 0,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | Unit | - | 0 | Unit | 0 | Unit | 0,00% | - | Unit | 0,00 | Unit | 0,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 99,89% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 58,87% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Meyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 | Laporan | - | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100,00% | 12 | Laporan | 24,00 | Laporan | 100,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 | Bulan | - | 12 | Bulan | 12 | Bulan | 100,00% | 11 | Bulan | 23,00 | Bulan | 47,92% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 48 | Laporan | - | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100,00% | 12 | Laporan | 24,00 | Laporan | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | Orang | - | 1 | Orang | 1 | Orang | 100,00% | 1 | Orang | 2,00 | Orang | 50,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 99,97% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 23,08% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 | Unit | - | 6 | Unit | 3 | Unit | 50,00% | 0 | Unit | 3,00 | Unit | 25,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | Unit | - | 1 | Unit | 0 | Unit | 0,00% | 0 | Unit | 0,00 | Unit | 0,00% |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 89% | Persen | 0,89% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----|--------|---|-----|--------|--------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 100% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 50,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 | Paket | - | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% | 1 | Paket | 2,00 | Paket | 50,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 | Paket | - | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% | 1 | Paket | 2,00 | Dokumen | 50,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 100 | Persen | | 100 | Persen | 100% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 100,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 4 | Paket | | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% | 1 | Paket | 2,00 | Paket | 50,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 57,69% | Persen | 0,58% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 50,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 4 | Paket | - | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% | 1 | Paket | 2,00 | Paket | 50,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan | 100 | Persen | | 100 | Persen | 100% | Persen | 100,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 50,00% |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 4 | Paket | | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% | 1 | Paket | 2,00 | Paket | 50,00% |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 100% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100% | Persen | 39,20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-----|--------|---|-----|--------|--------|--------|---------|-----|--------|---------|--------|--------|
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Desa | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 100% | Persen | 100,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 39,20% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Kegiatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 72 | Kali | - | 18 | Kali | 18 | Kali | 100,00% | 18 | Kali | 36,00 | Kali | 50,00% |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 280 | Kali | - | 70 | Kali | 70 | Kali | 100,00% | 32 | Kali | 102,00 | Kali | 36,43% |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan baik | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 100% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 45,00% |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 99,95% | Persen | 1,00% | 100 | Persen | 100,00% | Persen | 45,00% |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 280 | Kali | - | 70 | Kali | 70 | Kali | 100,00% | 56 | Kali | 126,00 | Kali | 45,00% |
| 7 | 01 | 06 | 2.02 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik dan benar | 420 | Kali | - | 80 | Kali | 80 | Kali | 100,00% | 65 | Kali | 145,00 | Kali | 34,52% |
| 7 | 01 | 06 | 2.02 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan aset desa yang dilaksanakan dengan baik dan benar | 280 | Kali | - | 70 | Kali | 70 | Kali | 100,00% | 66 | Kali | 136,00 | Kali | 48,57% |
| 7 | 01 | 06 | 2.02 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik. | 280 | Kali | - | 70 | Kali | 70 | Kali | 100,00% | 63 | Kali | 133,00 | Kali | 47,50% |
| 7 | 01 | 06 | 2.02 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa | 280 | Kali | - | 70 | Kali | 70 | Kali | 100,00% | 65 | Kali | 135,00 | Kali | 48,21% |
| 7 | 01 | 06 | 2.02 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan | 280 | Kali | - | 70 | Kali | 70 | Kali | 100,00% | 66 | Kali | 136,00 | Kali | 48,57% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----|--------|---|-----|--------|----|--------|-------|-----|--------|-------|--------|-------|
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 0% | Persen | 0,00% | 100 | Persen | 0,00 | Persen | 0,00 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 | Persen | - | 100 | Persen | 0% | Persen | 0,00% | 100 | Persen | 0,00% | Persen | 0,00% |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan peringatan hari lahir pancasila | 8 | Kali | - | 2 | Kali | 0 | Kali | 0,00% | 0 | Orang | 0,00 | Orang | 0,00% |
| 7 | 01 | 05 | 2.02 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 4 | Paket | | 1 | Paket | 0 | Paket | 0,00% | 0 | Paket | 0,00 | Paket | 0,00% |
| 7 | 01 | 05 | 2.03 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terlaksananya pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama dan lainnya | 4 | Paket | | 1 | Paket | 0 | Paket | 0,00% | 0 | Paket | 0,00 | Paket | 0,00% |
| 7 | 01 | 05 | 2.02 | 05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional melalui kegiatan peringatan hari lahir pancasila | 4 | Paket | | 1 | Paket | 0 | Orang | 0,00% | 0 | Orang | 0,00 | Orang | 0,00% |
| 7 | 01 | 05 | 2.02 | 6 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional melalui kegiatan peringatan hari lahir Pancasila | 4 | Paket | | 1 | Paket | 0 | Desa | 0,00% | 0 | Desa | 0,00 | Orang | 0,00% |

6.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maukaro

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Maukaro dilakukan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2019-2024 sedangkan tolok ukur SPM dan indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Maukaro belum ditetapkan indikator pelayanannya yang disajikan pada tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel. 2.2.1
Indikator Kinerja Kecamatan Maukaro yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD (Renstra 2019-2024)

| NO | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|---|--------|---|--------|-------|-------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 1 | OPINI BPK | NILAI | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | NILAI AKIP | NILAI | cc | cc | Bb | bb | bb |
| 3 | NILAI LPPD | NILAI | 2.8458 | 2.8458 | 2.958 | 2.958 | 2.958 |
| 4 | Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah | - | - | - | - | - | - |

Tabel. 2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Maukaro

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Proyeksi | | | | | Catatan Analisis | |
|----|---|----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 2 | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah dengan baik | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 3 | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Masyarakat dengan baik | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 4 | Menurunnya Kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 5 | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan baik | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 6 | Persentase Desa yang menetapkan Dokumen Perencanaan dan penyelenggaraan tepat waktu | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 7 | Persentase Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Kemandirian desa Kecamatan Maukaro dapat digambarkan, pada tahun 2021 adalah 9 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang. Pada tahun 2022 adalah 8 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang sedangkan pada tahun 2023 8 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang. Diproyeksikan pada tahun 2024 8 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang dan pada tahun 2025 diproyeksikan 7 Desa Tertinggal 2 Desa Berkembang 2 Desa Maju. Tingkat kemajuan desa yang pada tahun 2021 belum ada nilainya karena belum ada data dukung yang diperoleh. Target indikator kedua ini pada tahun 2022 sebesar 85 %, tahun 2023 95% dan proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 95%. Nilai indikator kinerja kedua ini diperoleh dari data perbandingan antara Dasa Wisma aktif, Karangtaruna aktif, Posyandu aktif, LPM aktif, wajib pajak taat bayar PBB dan angka penurunan stunting. Perolehan Nilai AKIP Kecamatan Maukaro pada tahun 2022 adalah "c", pada tahun 2023 adalah "cc" dan diproyeksikan pada tahun 2024 dan 2025 dapat memperoleh masing-masing nilai "b"

6.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemerintah Kecamatan Maukaro, berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah Kecamatan Maukaro dapat menjalankannya dengan baik, namun secara teknis masih terdapat beberapa masalah yang harus diatasi; antara lain :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkanlah SDM aparatur Pemerintah kecamatan yang kompeten, karena itu harus dilaksanakan diklat-diklat dan bimtek-bimtek ke luar daerah; akan tetapi yang sering terjadi adalah aparatur yang mengikuti bimtek dan diklat merupakan aparatur yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini tentu tidak akan memberikan dampak bagi peningkatan SDM aparatur kecamatan. Melihat hal tersebut diatas, maka sangatlah dibutuhkan aparatur yang berkualitas, karena itu segala bentuk diklat dan bimtek perlu dilaksanakan secara bergantian antar aparat sehingga adanya keseimbangan dalam peningkatan SDM dan terwujudnya optimalisasi SDM aparatur Pemerintah Kecamatan Maukaro.

b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk program ini belum adanya kerjasama tim / antar aparat sehingga masih mengalami kendala dalam pelaporan, terutama dari segi waktu, sering kali terjadi

keterlambatan dari beberapa desa dan kelurahan sehingga aparatur kecamatan harus menjemput data-data laporan tersebut ke desa-desa. Masih terdapatnya perbedaan format/bentuk pelaporan bulanan dari Pemerintah Desa/Kelurahan, karena itu pemerintah kecamatan harus melakukan bimbingan, pembinaan dan penataan secara rutin.

c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan.

Untuk sistem pengawasan selama ini belum semuanya terarah dengan baik, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan juga karena keterbatasan aparatur kecamatan. Dalam kaitan dengan fungsi pemberdayaan, masih terdapat kelompok-kelompok bantuan di masyarakat yang belum terjangkau untuk diberdayakan; sedangkan dalam bidang pemerintahan, masih dibutuhkan pembinaan administrasi desa secara terus menerus, meningkatkan koordinasi lintas sektor; dalam fungsi keamanan dan ketertiban masih sangat minimnya tenaga aparatur kecamatan baik dari segi kualitas untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan pemberdayaan pembangunan dalam wilayah kecamatan karena ini merupakan indikator utama yang masuk dalam dokumen RPD Kabupaten Ende

Beberapa masalah dan hambatan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas fiskal rill daerah yang masih sangat terbatas sehingga berdampak pada pendanaan untuk kegiatan- kegiatan yang bersifat strategis di Kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, apalagi kalau dilihat dari letak kecamatan Maukaro berbatasan dengan Laut SawudiSebelah Utara, berbatasan dengan Laut Sawu di sebelah Selatan,berbatasan dengan Laut Sawu disebelah Timur dan berbatasan dengan Laut Sawu disebelah Barat sehingga sarana dan prasarana umum harus dibangun dengan baik;
2. Belum adanya regulasi dalam hal ini peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat, sehingga ruang gerak kecamatan dalam hal pelayanan belum jelas, pemerintah kecamatan hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutinitas saja;
3. Kecamatan tidak diberikan ruang yang luas dalam pembinaan pengelolaan dana desa sehingga berdampak pada keterlambatan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan juga evaluasi;
4. Adanya beban tugas tambahan bagi pegawai di luar pelaksanaan tugas pokok, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian target kegiatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Kecamatan Maukaro
Tahun 2023

| No | Jabatan | Pendidikan/ Latar Belakang Pendidikan | Kondisi Staf | |
|----|---|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | Keadaan Pegawai Tahun 2023 | Jumlah Pegawai yang diharapkan |
| 1. | Camat | Strata Satu (S2) (Master Hukum) | 1 Orang | |
| 2. | Sekretaris Camat | Strata Satu (S1) (Serjana Ilmu Pemerintahan) | 1 Orang | |
| 3. | Kasie Pemerintahan | - | - | 1 Orang |
| 4. | Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa | Strata Satu (S1) (Serjana Pertanian) | 1 Orang | |
| 5. | Kasie Pelayanan Umum | Strata Satu (S1) (Sarjana Hukum) | 1 Orang | |
| 6. | Kasie Polisi Pamong Praja dan Linmas | Strata Satu (S1) (Serjana Sosial) | 1 Orang | |
| 7. | Kasie Kesejahteraan Masyarakat | Strata Satu (S1) (Sarjana Sosial) | 1 Orang | |
| 8. | Kasubbag Program Keuangan dan Pelaporan | Strata Satu (S1) (Sarjana Sosial) | 1 Orang | |
| 9. | Kasubbag Kepegawaian | Strata Satu (S1) (Sarjana Sosial) | 1 Orang | |
| 10 | Staf | SMA Sederajat | 10 Orang | |

Dari komposisi yang ada jumlah pegawai di Kantor Camat Maukaro sebanyak 18 orang, dimana 8 orang menduduki jabatan dan 10 orang sebagai staf. Oleh sebab itu banyak tugas yang dikerjakan oleh kepala seksi yang sebenarnya porsinya staf ataupun sebaliknya ada juga tugas yang porsinya para kepala seksi dan kasubbag yang dikerjakan oleh staf. Selain mengerjakan tugas pokok dalam tiap seksi, staf juga ditunjuk oleh pimpinan sebagai bendahara baik rutin maupun gaji. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di kecamatan Seharusnya tiap seksi membawahi 4 orang staf sementara tiap kasubbag membawahi 3 orang staf, sehingga tidak terjadi pembebanan tugas tambahan yang melebihi tugas pokok.

Dari gambaran masalah yang dihadapi tersebut, maka dampak yang akan sangat dirasakan adalah besarnya ketergantungan camat terhadap alokasi kegiatan Dinas, Badan dan Kantor (PD di Kabupaten), meskipun hal yang sangat berhubungan dengan tugas-tugas atributif (yang melekat pada jabatan).

Yang sangat dirasakan saat ini adalah dalam hal pembinaan pemerintahan desa. Jika saja fungsi ini terus dipahami bahwa kecamatan hanya sebatas melakukan monitoring dan evaluasi maka akan menjadi kontraproduktif bagi pencapaian visi dan misi kepada daerah : *"membangun dari Desa dan Kelurahan"*, serta tidak memberikan kontribusi positif bagi kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Beberapa tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Maukaro adalah :

a. Peluang

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende yang sudah tertata dengan baik;
2. Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diberikankesempatan untuk merumuskan perencanaan kegiatan dan keuangan (meski baru sebatas kegiatan rutin);
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Adanya Situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maukaro.

b. Tantangan

1. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai
2. kebijakan pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kecamatan Maukaro;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
4. Daya dukung kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang masih belum seimbang dengan tuntutan pelayanan pemerintahan saat ini;
5. Kondisi geografis wilayah dengan topografis daerah pegunungan, menyebabkan kebutuhan biaya yang cukup tinggi dan kesulitan dalam memprediksi kemampuan potensi wilayah secara riil dalam kerangka persiapan perencanaan yang berkualitas;
6. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
7. Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selain semakin menegaskan hakikat otonomi desa tetapi juga memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :

1. Merumuskan Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah kepada Camat. Hal ini akan memberikan peluang dalam hal pendekatan pelayanan dan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sesuai amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, serta memudahkan bagi kecamatan dalam melakukan pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal.
2. Memberikan kesempatan kepada kecamatan untuk merencanakan anggaran yang langsung berhubungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan pemerintahan desa (Bimtek bagi aparat dan lembaga – lembaga kemasyarakatan di desa) serta pengembangan kapasitas pegawai (BKPSDM). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Semakin memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah (koordinator penyelenggaraan pemerintahan) di wilayah kecamatan.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran dimana kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki sehingga dilakukan seleksi terhadap pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berdasarkan pertimbangan program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota.

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Rencana Program kegiatan Pemerintah Kecamatan Maukaro untuk Tahun 2025 masih tetap sama/tidak mengalami perubahan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan pertama-tama atas pertimbangan kondisi riil, kebutuhan organisasi serta bertujuan meningkatkan daya dukung terhadap pelaksanaan tupoksi kecamatan. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pada Tahun Anggaran 2024 kegiatan ini ada dalam RKA/DPA, sehingga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan kembali dalam Renja Kecamatan demi tercapainya Peningkatan sumber daya Aparatur.

Penjelasan mengenai Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel 2.4 (terlampir).

Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
Maukaro

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|----------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |
| | Kecamatan | | | | 1.764.529.952 | Kecamatan | | | | 1.638.491.764 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | 100 % | 1.650.529.952 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | 100 % | 1.650.529.952 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 32.500.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 32.500.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 8.500.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 8.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.900.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.900.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 |

| No | Rancangan Awal RKP1 | | | | | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | | | | |
|----|---|------------------------------|--|----------------|---------------------|---|------------------------------|--|----------------|---------------------|
| | Program/Kegiatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 4.000.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.206.029.952 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.206.029.952 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bulan | 1.189.529.952 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bulan | 1.189.529.952 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 6.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 6.000.000 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKP | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKP | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD | 6 Laporan | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD | 6 Laporan | 4.000.000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | | | | |
|----|--|------------------------------|---|----------------|---------------------|--|------------------------------|---|----------------|---------------------|
| | Program/Kegiatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 17.500.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 17.500.000 |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000 |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.000.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.000.000 |
| | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 6Laporan | 3.000.000 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 6Laporan | 3.000.000 |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD | 6Laporan | 4.000.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD | 6Laporan | 4.000.000 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | 6 Laporan | 4.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | 6Laporan | 4.000.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 8.500.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 8.500.000 |
| | Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 2.000.000 | Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 2.000.000 |
| | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 2.000.000 | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 2.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------|-------------|--|------------------------------|---|-----------|-------------|
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 2.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 2.000.000 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 2.500.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 2.500.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 155.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 155.000.000 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 6.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 6.000.000 |
| Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 15.000.000 | Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 15.000.000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 Paket | 15.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 Paket | 15.000.000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 11.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 11.000.000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6Laporan | 24.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 24.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 70.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 70.000.000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 68.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 68.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | 25.000,000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | 25.000,000 |
| Pengadaan Mebel | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel | 10 Unit | 25.000.000 | Pengadaan Mebel | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel | 10 Unit | 25.000.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6 Unit | 18.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6 Unit | 18.000.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 47.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 47.000.000 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6Laporan | 3.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6Laporan | 3.000.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6 Laporan | 14.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6Laporan | 14.000.000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 Laporan | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6Laporan | 15.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6Laporan | 15.000.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 116.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 116.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------|------------|--|------------------------------|---|-----------|------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 10.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 61.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 61.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 15.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 15.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10 Unit | 15.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik | 100 % | 30.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik | 100 % | 30.000.000 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Baik | 100 % | 10.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Baik | 100 % | 10.000.000 |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan | 10.000.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan | 10.000.000 |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan | 100% | 20.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan | 100% | 20.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 6 Dolumen | 10.000.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 6 Dolumen | 10.000.000 |
| Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta | 1 Unit | 10.000.000 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Unit Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta | 1 Unit | 10.000.000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik | 100 % | 11.500.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik | 100 % | 11.500.000 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik | 100 % | 5.500.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik | 100 % | 5.500.000 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 2.500.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 2.500.000 |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 6.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 6.000.000 |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 2.000.000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 2.000.000 |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 2.000.000 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 2.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|-----------|------------|--|------------------------------|---|-----------|------------|
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 6Laporan | 2.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 6Laporan | 2.000.000 |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 15.000.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 15.000.000 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 10.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 10.000.000 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 5.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 5.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6 Laporan | 5.000.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6Laporan | 5.000.000 |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 5.000.000 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 5.000.000 |
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 6 Laporan | 5.000.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 6 Laporan | 5.000.000 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik | 100 % | 15.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik | 100 % | 15.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------|------------|--|------------------------------|--|------------|------------|
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik | 100% | 15.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik | 100% | 15.000.000 |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 5 Orang | 15.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 5 Orang | 15.000.000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 42.500.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 42.500.000 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 42.500.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 42.500.000 |
| | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 11 Dokumen | 18.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 11 Dokumen | 18.000.000 |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 11 Dokumen | 14.500.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 11 Dokumen | 14.500.000 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 11Laporan | 10.000.000 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Kecamatan Maukaro | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 11Laporan | 10.000.000 |

1.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja adalah melalui mekanisme yang diawali dari musrenbang Desa, musrenbang kecamatan hingga di forum OPD. Dalam Musrenbang Kecamatan diusulkan 10 kegiatan yang dibahas di forum Musrenbang Kecamatan dan 5 kegiatan diverifikasi OPD Teknis untuk ditentukan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku. akan masuk kedalam Rencana Kerja OPD Teknis, dari 15 Usulan dapat diuraikan sebagai berikut :

10 (sepuluh) Usulan yang dibahas di Forum Musrenbang tingkat Kecamatan, yaitu:

1. Rehabilitasi Pustu Nabe dan Fasiitas Pendukungnya
2. Rehabilitasi Sedang Gedung Perpustakaan SDK Kamubheka;
3. Rehabilitasi sedang ruang perpustakaan SDI Ratesuba;
4. Pengembangan Pustu dan Fasilitas Pendukungnya Desa Nabe;
5. Bantuan Peralatan Tenun Ikat industri kecil bagi kelompok di Desa Magekapa;
6. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Desa Kebirangga;
7. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Nioniba;
8. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Desa Magekapa;
9. Urukun dan Drainase Puskemas Maukaro;
10. Pembangunan Rumah tidak layak huni perdesaan Desa Kebirangga Selatan;
11. Pembangunan Lumbung Pangan Desa di Desa Natanangge;

Sedangkan 5 usulan yang diverifikasi oleh OPD Teknis adalah :

1. Rahabilitasi Sedang Gedung Perpustakaan SDI Ratesuba;
2. Rahabilitasi Sedang Gedung Perpustakaan SDK Kamubheka;
3. Urukun dan Drainase Puskemas Maukaro;
4. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Desa Magekapa;
5. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi di Pantai Maukaro dan Nioniba.

sedangkan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya tidak ada yang masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025, dan adapun usulan-usulan di atas yang tidak diterapkan kedalam renja Kecamatan Maukaro tetapi masuk pada Renja Perangkat Daerah Teknis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan kerangka arah pembangunan pada RPD tahun 205-2026 yang merupakan terjemahan dari visi misi dan 5 arahan utama Persiden dan wakil Persiden yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan perangkat daerah maka telah di tetapkan 7 agenda utama pembangunan.

1. Memperkuat ketahan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadial.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualiats dan berdaya saing.
4. Revolusi mentaldan pembanguan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, mningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, Hukum, Pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Maukaro memiliki relenvansi dan mendukung seluruh agenda pembangunan Nasional terutama melalui agenda ke 7. Sedangkan salah satu kelembagaan yang melaksanakan agenda pembangunan nasional yang ketujuh adalah kementerian dalam negeri. Hal ini merujuk pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang renstra kementerian dalam negeri. Sehiangga dalam penyusunan Renstra Kecamatan Maukaro perlu merujuk pada renstra kementerian dalam negeri. Selain itu Renstra kecamatan Maukaro juga perlu pelakukan telaaan RPD Provinsi NTT kareana kecamatan Maukaro berada di wilaya provinsi NTT.

Berikut ini tabel yang menggambarkan keselarasan antara RPD Tahun 2025-2026, Renstra Kementerian Dalam negeri Tahun 205-2026, Perda Provinsi NTT Nomor 04 tahun 2019 dan sasaran RPD sesuai peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-

2026 yang menjadi bahan perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.1
Penyelarasan tiap tingkatan pembangunan dalam perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026

| Agenda utama/prioritas pembangunan nasional | Tujuan Strategis Kemendagri | Agenda utama/prioritas pembangunan Daerah Provinsi NTT | Tujuan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 |
|---|---|--|---|
| <p><u>Prioritas Ke-Tujuh</u> Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa(T1) 2. Peningkatan kapasitas dan sinergis pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inivasi (T2) 3. Peningkatan Tata Kelolah Pemerintahan yang baik dilingkungan Kementrian Dalam Negeri (T3) | <p><u>Prioritas Ke-Lima</u> Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birkrasi.</p> | <p><u>Tujuan Ke-5.1</u> Terwujudnya tata kelolah Pemerintahan yang baik (Good Governmance)</p> <p><u>Sasaran Ke 5.1.1</u> Meningkatnya Birokrasi yang bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.</p> |

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat ditentukan faktor-faktor penghabat kinerja pelayanan Kecamatan Maukaro dalam upaya mendukung kinerja program untu mencapai Visi Misi Kabupaten Ende serta secara tidak langsung juga akan berkontribusi dalam pencapaian agenda utama/prioritas maupun tujuan pembangunan pada tiap tingkatan antara lain.

1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu)
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam segala bidang.

3. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih Rendah baik dalam penerapan pola hidup sehat, menciptakan suasana yang aman dan tenang maupun meningkatkan kemandirian hidup.
4. Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang masih rendah.
5. Kurangnya juknis/juklak dalam pelaksanaan kinerja program.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih belum memadai. Secara normal jabatan baik JA, memiliki peran dan tugas yang saling mendukung serta tiap jabatan memiliki beban kerja masing-masing sehingga perlunya kualitas sumber daya manusia untuk mengisi tiap jabatan namun kondisi personil di Kecamatan Maukaro sangat tidak memadai dan dalam kondisi sekarang para pemangku jabatan terpaksa juga melaksanakan tupoksi baik JFP dengan demikian proses pelayanan dan penyelesaian pekerjaan tidak berjalan dengan baik dan optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maukaro

3.2.1 Tujuan Renja

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang suatu hal yang ingin di capai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu jangka waktu menengah. Tujuan yang akan di capai oleh Kecamatan Maukaro Tahun 2025-2026 mengalami perubahan yaitu **"Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien"** tujuan tersebut akan di ukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu 1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Nilai LPPD/ Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh setiap instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (Tahunan, Semesteran, Bulanan) dari masing-masing tujuan yang telah di tetapkan dan renstra kecamatan maukaro menetapkan sasaran sebagai berikut. 1. Meningkatkan kinerja perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi. 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan baik. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk alat ukur dalam pencapaiannya :

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran jangkah menengah pelayanan Kecamatan Maukaro
(Renstra 2025-2026)

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN | | | | |
|----|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien | | 1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Nilai LPPD 4. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Opini Nilai Nilai - | - - - - | WTP CC 2.8452 - | WTP B 2.9580 - | WTP B 2.9580 - | WTP B 2.9580 - |
| | | 1. Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi | Nilai Akip Perangkat Daerah | Nilai | - | CC | B | B | B |
| | | 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa | Tingkat Kemadirian Desa 1. Desa sangat tertinggal 2. Desa Tertinggal 3. Desa Berkembang 4. Desa Maju | Desa | - - - - | - 10 1 - | - 8 2 1 | - 8 2 1 | - 7 2 2 |

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Maukaro Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebagai pembandingan dengan rancangan awal RPD kabupaten ende Tahun . Analisis kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Kecamatan Maukaro Tahun 2025 yakni menyelenggarakan 6 (enam) program 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 59 (lima Puluh Sembilan) sub kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.3

Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende
KECAMATAN MAUKARO

| KODE REKENING | | | | | | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | | | |
|---------------|----|----|------|----|------|--|---|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| 7 | 01 | | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 1.764.529.952 | | | 1.792.864.898 |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 1.650.529.952 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | | 100% | 1.658.364.898 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 32.50.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | | 100% | 34.000.000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 8.600.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 8.000.000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 5.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------|---|---|--------------------------------|-------------|----------------------|--|-------------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 5.900.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 6.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 5.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 5.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 5.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah secara lengkap, memadai dan tepat waktu | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | - |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan perangkat Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 1.206.029.952 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 1.183.968.898 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya Tambahan Penghasilan Pegawai | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 1.169.529.952 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 1.165.964.898 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------|---|--|--------------------------------|-------------|-------------------|--|-------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 6.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 7.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 4.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 3.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 4.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 17.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 18.500.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 3.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 4.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 3.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 3.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 3.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------|---|--|--------------------------------|-------------|------------------|--|-------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 4.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 4.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 11.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 3.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0003 | Pendataan dan Pengolaan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolaan Administrasi Kepegawaian | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 2.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 3.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 3.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------|---|--|--------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|--|-------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 156.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | | 100% | 156.900.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 6.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 7.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100% | 15.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100 % | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Ptersedianya Bahan Logistik Kantor | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya pencetakan Dokumen Kantor Terlaksananya Penggandaan Bahan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 11.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 12.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 6 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 24.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 20.400.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------|--|--|--------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 8 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Keikutsertaan dalam rapat koordinasi internal dan konsultasi di luar daerah Tersedianya makan minum harian rapat bulanan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 70.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 73.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 8 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 4.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 4.500.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terwujudnya Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara baik selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 68.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 69.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 25.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 25.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Pengadaan Mebel | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 25.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 25.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0011 | Pengadaan Serana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Serana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 18.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 19.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 47.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 47.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------|---|--|--------------------------------|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 3.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 4.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 14.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 14.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 14.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara Baik selama 1 tahun | Kecamatan Maukaro | 100% | 116.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 138.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pembayaran untuk Perpanjangan STNK, Pajak dan pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pembayaran untuk Perpanjangan STNK, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 61.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 70.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya/terehabilitasi gedung kantor dan banguna lainnya | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 15.000.00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 18.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya/terehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan banguna lainnya | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 15.000.00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 18.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya/terehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor dan banguna lainnya | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 15.000.00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 17.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 30.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 35.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Maukaro | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 10.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|---|---|-------------------------------------|-------|------------|--|-------|------------|
| 7 | 01 | 02 | 2 | 03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kecamatan Maukaro | 100 % | 20.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | 25.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kab. Ende, Ende Seiatan, Semua Desa | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 12.500.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 03 | 0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta | Terlaksananya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta | Kab. Ende, Ende Seiatan, Semua Desa | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 12.500.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan Maukaro | 100 % | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | - |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | - |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | - |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------------|--|-------------|-------------------|
| 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100% | 11.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Baik | Kecamatan Maukaro | 100% | 5.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 14.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 3.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 7.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 7.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kecamatan Maukaro | 100% | 6.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | 6.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 3 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 2.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 3 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 2.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|--|--|-------------------------------------|-------|------------|--|-------|-------------------|
| 7 | 01 | 03 | 2 | 3 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 2.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik | Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Desa | 100 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | 2 | 01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Maukaro | 100% | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 14.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | 2 | 01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 7.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | 2 | 01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 7.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | 2 | 02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terwujudnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kecamatan Maukaro | 100% | 5.000.000 | | 100% | 6.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | 2 | 02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 6.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|------|--|--|--------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 7 | 01 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100% | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Maukaro | 100% | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Terciptanya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100% | 42.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 45.500.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100% | 42.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum- | 100% | 45.500.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 18.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 18.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Tersedanya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 14.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 14.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|------|---|---|--------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kab. Ende, Maukaro, Semua Desa | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100 % | 12.000.000 |
|---|----|----|---|----|------|---|---|--------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|------------|

BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan skenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro pada tahun 2025 yang diawali dari tahap persiapan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan (Juli s/d Desember 2024)
 - Setelah penetapan Renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Kecamatan Maukaro sebagai bahan Rancangan APBD 2025;
 - Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan;
 - Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan);
 - Persiapan proses pengadaan barang/jasa.
- b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2025
- c. Tahap Pengendalian dan Evaluasi
 - Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
 - Pengendalian dan evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja);

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun Pendanaan Perangkat Daerah melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Maukaro sesuai dengan Dokumen RPD tahun 2025 semuanya berasal dari APBD Kabupaten Ende dengan Pagu Rp.1.764.529.952,-

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025, adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (khususnya rencana Alokasi program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Maukaro); yang selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA / DPA Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2025.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Maukaro Tahun Anggaran 2024 dikendalikan oleh Camat Maukaro selaku Kepala SKPD dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan. Dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub unit organisasi (Sekretariat dan seksi) di Kecamatan Maukaro.
3. Camat akan melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya menjadi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Maukaro dalam bentuk: Laporan Rutin Kegiatan Bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan, serta Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada akhir Tahun Anggaran. Hasil Evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka review Rencana Kerja tahun berikutnya.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka Kecamatan Maukaro akan menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Maukaro ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, khususnya bagi Kecamatan Maukaro.


Pj. BUPATI ENDE,
AGUSTINUS G. NGASUAY